

Analisis Integritas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Terhadap Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kudus

Tesis

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum



Diajukan Oleh

Moh Wahibul Minan

201802017

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

ANALISIS INTEGRITAS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS) DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS)
TERHADAP PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM (PHPU) PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019
DI KABUPATEN KUDUS

Disusun Oleh:

Moh Wahibul Minan

NIM 201802017


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 29 Februari 2020

Pembimbing Utama



Dr. Subarkah, SH., M.Hum
NIS 061070100001017

Anggota Dewan Penguji I



Dr. Hidayatullah, SH., M.Hum
NIS 0610701000001007

Pembimbing Pendamping



Dr. Suparnyo, SH., MS
NIS 0610701000001014

Anggota Dewan Penguji II



Dr. Iskandar Wibawa, SH., MH
NIS 0610701000001013

Tesis ini diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hidayatullah, SH., M.Hum
NIS 0610701000001007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Yakin akan pemberian Allah”

Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku Kabulkan (Al-Mukmin : 60)

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan Kepada :

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S., Rektor UMK yang selaku pembimbing dalam penyusunan tesis;
2. Bapak Dr. Subarkah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama dalam penyusunan tesis;
3. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi MIH UMK;
4. Kedua orang tua saya Bapak H. Musthofa dan ibu Muhtaroh yang tidak bosan-bosan mendoakan untuk kesuksesan anaknya.
5. Istri tercinta Ulya Mukhiqqotunni'mah, yang selalu memberikan support dalam menyelesaikan studi.
6. Ketiga buah hatiku Asyiq, Chaca dan Adelia.
7. Seluruh keluarga besar BAWASLU Kabupaten Kudus.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH WAHIBUL MINAN

NIM : 201802017

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus,



Yang Membuat Pernyataan

MOH WAHIBUL MINAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik dan Hidayah-Nya, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis ini dengan judul **“Analisis Integritas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Terhadap Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kudus”**

Pada dasarnya tesis ini disusun guna melengkapi sebagian dari tugas yang sekaligus merupakan persyaratan dalam mencapai derajat magister pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dr. Subarkah, SH, M.Hum, Dosen Pembimbing Utama yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan;
3. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Pembimbing Pendamping dalam penyusunan Tesis ;
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, khususnya dalam upaya perolehan data dalam penulisan Tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari, bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran penulis nantikan untuk kesempurnaan penulisan tesis.

Akhirnya, penulis berharap, semoga tesis ini dapat berguna bagi penulis khususnya, dan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Kudus,

P e n u l i s

MOH WAHIBUL MINAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Definisi Demokrasi	28
B. Lembaga Penyelenggara Pemilu	31
C. Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	33
D. Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	35
E. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)	36
F. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	37
G. Integritas Penyelenggara Pemilu	39
H. Integritas Pemilu	40

I. Indikator Pemilu Berintegritas	42
J. Tugas KPPS	43
K. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)	45
L. Mahkamah Konstitusi (MK)	46
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Integritas KPPS dan PTPS pada Pemilu Tahun 2019	47
1. Integritas Penyelenggara Pemilu	47
a. Paramater Integritas Penyelenggara Pemilu	50
b. Indikator Penyelenggara Pemilu Berintegritas	51
c. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS	55
d. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pengawas TPS Pada Pemilu 2019.....	59
e. Kompetensi Penyelenggara Pemilu KPPS dan Pengawas TPS	66
f. Permasalahan yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara	78
2. Potensi Kecurangan KPPS dan PTPS Berdasar Indek Kerawanan Pemilu	86
a. Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara	90
b. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	93
c. Paska Pemungutan dan Penghitungan Suara	98
B. Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kudus.....	131
1. Latar Belakang Terjadinya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilu Legislatif Tahun 2019.....	131
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilu.....	135
3. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kudus	138
a. Para Pemohon PHPU di Kabupaten Kudus	140
b. Pihak-pihak dalam sidang PHPU	143
c. Batasan Waktu Dalam Penanganan PHPU di MK	145
4. Alasan Hukum Pemohon dalam Permohonan PHPU Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kudus	146
a. Pokok Pemohon Partai Gerindra	147
b. Pokok Pemohon Partai Amanat Nasional	154

c. Pokok Permohonan Partai Hanura.....	168
d. Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon.	169
e. Jawaban Pemberi Keterangan.....	178
5. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan PHPU Pemilihan Legislatif di Kabupaten Kudus.....	210

BAB IV

PENUTUP.....	216
---------------------	------------

A. Simpulan.....	216
-------------------------	------------

B. Saran.....	217
----------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	219
-----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Masalah-masalah yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Kudus	79
Tabel 2.	Kejadian rekapitulasi di tingkat Kecamatan	100
Tabel 3.	Pemohon PPHU Kabupaten Kudus	142
Tabel 4.	Perolehan suara menurut Pemohon (Partai Gerindra)	147
Tabel 5.	Pencermatan Pemohon (Partai Gerindra)	148
Tabel 6.	Persandingan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional).....	154
Tabel 7.	Uraian atas penambahan suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional).....	155
Tabel 8.	Kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) Desa Bulungcangkring	156
Tabel 9.	Kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) Desa Bulung Kulon	158
Tabel 10.	Kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) Desa Gondoharum	158
Tabel 11.	Kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) Desa Hadipolo	159
Tabel 12.	Kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) Desa Honggosoco	160
Tabel 13.	Kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) Desa Jekulo	161
Tabel 14.	Kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) Desa Klaling	162
Tabel 15.	Kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) Desa Pladen	163
Tabel 16.	Kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) Desa Sadang	163
Tabel 17.	Kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) Desa Sidomulyo.....	164

Tabel 18. Kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) Desa Tanjungrejo.....	164
Tabel 19. Kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) Desa Terban.....	167
Tabel 20. Perolehan suara Partai Gerindra dalam permohonan Pemohon.....	169
Tabel 21. Perolehan suara Partai Gerindra menurut Termohon.....	171
Tabel 22. Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Kudus (Partai Gerindra)	179
Tabel 23. Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Kudus (Partai Amanat Nasional).....	181
Tabel 24. Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Kudus (Partai Amanat Nasional) DPK Desa Honggosoco	185
Tabel 25. Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Kudus (Partai Amanat Nasional) DPK Desa Hadipolo.....	186
Tabel 26. Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Kudus (Partai Amanat Nasional) DPK Desa Gondoharum	187
Tabel 27. Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Kudus (Partai Amanat Nasional) DPK Desa Bulungcangkring.....	188
Tabel 28. Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Kudus (Partai Amanat Nasional) DPK Desa Terban	190
Tabel 29. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kudus Desa Bulungcangkring	191
Tabel 30. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kudus Desa Bulung Kulon	194
Tabel 31. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kudus Desa Gondoharum ..	195
Tabel 32. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kudus Desa Hadipolo	196
Tabel 33. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kudus Desa Honggosoco ...	200
Tabel 34. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kudus Desa Jekulo.....	203
Tabel 35. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kudus Desa Klaling	204
Tabel 36. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kudus Desa Pladen	205
Tabel 37. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kudus Desa Sadang	207
Tabel 38. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kudus Desa Sidomulyo.....	208
Tabel 39. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kudus (Partai Hanura)	209

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur sengketa pemilu di MK..... 145

